



Peningkatan Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)

Improvement of Social Inclusion-Based Rural Library Management and Services to Support Sustainable Development Goals (SDGs)

Rahmat Fadhli¹, Meilina Bustari², Setya Raharja³, Sugiyono⁴

Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia^{1,2,3,4}

rahmat.fadhli@uny.ac.id¹, meilinabustari@uny.ac.id², setya@uny.ac.id³, sugiyono@uny.ac.id⁴

Kata Kunci :

Perpustakaan desa; inklusi sosial; pelibatan masyarakat;

ABSTRAK

Perpustakaan desa menjadi salah satu sarana yang ada di desa serta memiliki peran integral sebagai pusat kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pada pengelolaan perpustakaan desa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi seperti masyarakat banyak yang tidak mengenal perpustakaan desa, kurangnya kompetensi pengelola perpustakaan, pengelolaan perpustakaan yang tidak sesuai standar, kurangnya minat baca masyarakat, serta rendahnya partisipasi masyarakat pada program perpustakaan desa. Pengabdian ini bertujuan untuk mempromosikan program perpustakaan desa berbasis inklusi sosial yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat bahkan meningkatkan kesejahteraan melalui program yang disediakan pada masyarakat. Pengabdian dilakukan di Perpustakaan Desa Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelompok sasaran pengabdian adalah seluruh masyarakat desa diantaranya aparatur desa dan pengelola perpustakaan desa. Hasil program pengabdian yakni pengelolaan perpustakaan desa menjadi terstandar nasional serta program yang dimiliki oleh perpustakaan desa juga mewadahi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga keterampilan masyarakat dapat bertambah dan meningkat pada program perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

Keywords :

rural library; social inclusion; community engagement

ABSTRACT

The rural library is one of the existing facilities in the village and has an integral role as a center for community empowerment activities. In the management of the village library, there are several problems faced, such as many people who do not know the rural library, lack of competence for library managers, non-standard library management, lack of public interest in reading, and low community participation

in the rural library program. This service aims to promote social inclusion-based village library programs that can increase community participation and even improve welfare through programs provided to the community. The service was carried out at the Rural Library of Giripurwo Village, Girimulyo District, Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta. The target group for community service is the entire rural community, including village officials and village library managers. The results of the service program are that the management of the rural library has become national standard and the programs owned by the village library also accommodate and increase community participation. So that community skills can increase and increase in social inclusion-based rural library programs.

PENDAHULUAN

Pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam mengimplementasikan amanat pada Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah wajib memfasilitasi masyarakat khususnya pada daerah pedesaan untuk terus belajar dan mengembangkan wawasan dan pengetahuannya untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing global. Salah satu bentuk konkretnya adalah sarana perpustakaan desa. Perpustakaan desa diharapkan mampu menyediakan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat desa, serta dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan desa, serta menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan desa (Haryono, 2018).

Esensi pembentukan perpustakaan desa pada dasarnya ialah sebagai satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat desa. Di samping itu, nilai-nilai dasar yang ada dalam perpustakaan desa dapat menjadi sebagai sumber informasi utama bagi masyarakat, baik yang mau belajar, meneliti, berkarya, memperluas wawasan, mencari pengetahuan baru serta informasi-informasi lainnya yang dibutuhkan (Asnawi, 2015). Secara tegas, perpustakaan desa diakui melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Pada Pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa bentuk perpustakaan umum dapat diselenggarakan oleh pemerintah pada beberapa tingkat termasuk desa. Lebih lanjut, keberadaan perpustakaan desa dikuatkan dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Desa dan Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, pada Pasal 9a tentang pelayanan dasar desa dan Pasal 10g bahwa kewenangan lokal berskala desa antara lain meliputi pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya dan perpustakaan desa. Hal ini menjadi landasan hukum untuk penyelenggaraan perpustakaan desa.

Saat ini, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sebanyak 438 Unit perpustakaan desa yang tersebar di lima kabupaten dan kota yang ada. Kabupaten Kulon Progo memiliki sebanyak 92 perpustakaan desa atau memiliki proporsi sebesar 21% dari total perpustakaan desa yang ada di DIY. Pada penyelenggaraan perpustakaan desa tentunya menghadapi berbagai hambatan untuk pengoptimalan fungsi-fungsi perpustakaan desa. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim serta masalah yang dihadapi oleh mitra pengabdian ini, perpustakaan desa menghadapi kendala dalam pengelolaan maupun penyelenggaraannya khususnya Perpustakaan Desa Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo.

Pertama, perpustakaan desa yang belum dikenal luas oleh masyarakat. Bertolak belakang dengan visi dan misi perpustakaan desa, sebaiknya perpustakaan desa memiliki tujuan untuk melayani masyarakat dengan menyediakan bahan perpustakaan/bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta

sebagai sumber informasi rujukan bagi masyarakat desa dan pusat rekreasi dan sumber belajar masyarakat desa. Indikator ini didapatkan dengan minimnya kunjungan dan pemanfaatan perpustakaan desa bagi masyarakat. Analisis awal, hal ini disebabkan kurangnya promosi dan koordinasi perpustakaan desa ke masyarakat (Dinas Arsip Perpustakaan Gorontalo, 2018; Fitrianto, 2014).

Kedua, permasalahan yang dihadapi yakni kurangnya kompetensi pengelola perpustakaan desa. Pengelola perpustakaan desa tidak memiliki *background* atau latar belakang untuk pengelolaan perpustakaan desa. Hal ini menyebabkan pengelolaan perpustakaan desa tidak dilakukan dengan optimal sesuai dengan standar pengelolaan perpustakaan desa. Faktor motivasi juga berdampak pada pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola yang ada. Rendahnya motivasi untuk mengelola perpustakaan bahkan mengembangkan perpustakaan menjadikan pengelolaan perpustakaan berjalan apa adanya. Idealnya sumber daya manusia dan pengurus perpustakaan sebaiknya memiliki jenjang pendidikan minimal SLTA dan memiliki loyalitas, keterampilan dalam pengelolaan desa (Haryono, 2018).

Ketiga, penataan ruang perpustakaan yang kurang menarik, juga menjadi salah satu faktor rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Tata ruang perpustakaan desa yang monoton dan cenderung membosankan berdampak pada rendahnya minat masyarakat untuk memanfaatkan sebagai tempat belajar atau tempat rekreasi. Hal ini perlu diatasi sehingga perpustakaan desa menjadi tempat yang menarik untuk dimanfaatkan berbagai kalangan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Penataan ruang perpustakaan pada dasarnya perlu memperhatikan aspek fungsional. Tujuannya agar pemanfaatan perpustakaan dapat optimal sesuai dengan layanan yang disediakan oleh setiap perpustakaan serta membuat pemustaka menjadi leluasa dan nyaman dalam menggunakan perpustakaan (Wulandari & Rahma, 2017).

Keempat, kurangnya minat baca masyarakat melalui pelibatan masyarakat pada program perpustakaan. Esensinya perpustakaan desa memiliki peran besar untuk memfasilitasi dan menumbuhkan minat baca pada masyarakat (Kecamatan Gerokgak, 2021; Mukharomah, Holifatul Cikusin & Suyeno, 2019). Selain itu, dengan membangun perpustakaan desa yang meningkatkan minat baca masyarakat desa itu sendiri merupakan bagian dari pembangunan masyarakat untuk mewujudkan desa mandiri dan sumber daya manusia yang berkualitas (Alam, 2015). Indikator permasalahan ini muncul berdasarkan rendahnya pemanfaatan koleksi-koleksi yang disediakan oleh perpustakaan, baik untuk penggunaan baca di tempat maupun peminjaman koleksi oleh anggota perpustakaan. Pemanfaatan koleksi perpustakaan lebih banyak digunakan oleh kelas usia sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Sedangkan, pengguna perpustakaan desa adalah masyarakat pada seluruh aspek termasuk dewasa, maupun lansia.

Masalah-masalah di atas perlu diwadahi melalui pengembangan perpustakaan desa. Terlebih, tren pengembangan perpustakaan desa saat ini tidak hanya sebagai penyedia sumber informasi kepada masyarakat desa sekitar, melainkan lebih dari itu. Di samping itu, masalah perlu diwadahi melalui pengabdian berbasis pengembangan wilayah. Harapannya, dapat meningkatkan kualitas perpustakaan desa termasuk dengan kapabilitas pengelola perpustakaan. Dampaknya, tidak hanya bagi perpustakaan desa saja, melainkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya masyarakat yang ada pada desa tersebut. Dengan asumsi tersebut, maka diperlukan kerja sama dan sinergitas antara perangkat desa, pengelola perpustakaan, karang taruna, serta seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas SDM melalui perpustakaan.

Salah satu program yang dapat mengimplementasikan pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini yakni dengan mengadakan suatu pelatihan pengembangan perpustakaan desa. Pelatihan ini seyogyanya dilaksanakan secara kolaboratif antara perguruan tinggi, perangkat desa, pengelola perpustakaan dan seluruh lapisan masyarakat untuk peningkatan kualitas perpustakaan desa di Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Sehingga, dengan meningkatnya kualitas perpustakaan desa dapat mewartakan masalah-masalah yang berkaitan dengan literasi maupun masyarakat secara umum, dan menjadikan perpustakaan desa sebagai pusat pendidikan dan informasi di Kelurahan Giripurwo.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang tergambar sebagai berikut.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

Sasaran pada kegiatan ini adalah masyarakat yang ada pada Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Jumlah masyarakat yang terlibat sebanyak 51 orang yang terdiri atas Lurah, LPM Kelurahan, Pamong, Dukuh, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Kelurahan, Tim Penggerak PKK, Forum Pengurangan Resiko Bencana serta Karang Taruna.

Partisipasi mitra pada kegiatan ini berlangsung dari kegiatan persiapan sampai dengan kegiatan tindak lanjut. Pelatihan akan dilaksanakan di Perpustakaan Desa Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Pelatihan akan melibatkan seluruh unsur dari Kelurahan Giripurwo mulai dari perangkat kelurahan, karang taruna, pengelola perpustakaan termasuk masyarakat umum. Pelatihan-pelatihan yang disediakan diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan softskill mitra.

Tahapan yang dilakukan untuk melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra dikelompokkan pada beberapa kegiatan. Metode kegiatan sebagai berikut.

1. Tahap persiapan

Pada tahap persiapan ini, tim pengabdian melakukan beberapa hal yakni survey/observasi lapangan, pemantapan dan penentuan lokasi dan sasaran, dan penyusunan bahan/materi pelatihan, yang meliputi: makalah dan modul untuk kegiatan pengelolaan perpustakaan desa.

2. Tahap Pelaksanaan pelatihan

Tahap pelaksanaan pelatihan direalisasikan melalui sesi penyampaian materi dan sesi simulasi. Sesi penyampaian materi bertujuan untuk membekali peserta pelatihan secara teoritis tentang materi pengelolaan perpustakaan yang meliputi: kebijakan pemerintah dalam pengelolaan perpustakaan desa, membangkitkan motivasi diri, teknis pengelolaan perpustakaan, mendesain perpustakaan desa, dan menyusun program peningkatan minat baca di perpustakaan desa dan program-program untuk pelibatan masyarakat pada kegiatan perpustakaan desa. Untuk semakin menguatkan pemahaman peserta pelatihan tentang pengelolaan perpustakaan, maka tim PPM akan melanjutkan sesi penyampaian materi dengan sesi simulasi dan praktik, dimana peserta akan diajarkan tentang praktis pengelolaan perpustakaan. Dengan demikian, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan materi yang bersifat teoritis saja, namun juga dilengkapi dengan pengalaman yang bersifat praktis.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi direalisasikan dengan pengisian angket oleh peserta pelatihan. Adapun angket tersebut berisi tentang akseptabilitas penyelenggaraan pelatihan bagi peserta pelatihan, performa kerja tim PPM serta secara khusus pemahaman dan keterampilan peserta pelatihan. Informasi tentang akseptabilitas penyelenggaraan pelatihan akan memberikan masukan kepada tim PPM dalam perumusan kegiatan pelatihan selanjutnya dan menyusun materi yang lebih bermakna. Selanjutnya, informasi tentang performa kerja berfungsi sebagai masukan bagi tim PPM untuk senantiasa

meningkatkan kualitas diri, dalam kaitannya dengan pemberian pelayanan dalam konteks Pengabdian Pada Masyarakat (PPM). Sedangkan, hasil evaluasi pemahaman dan keterampilan peserta akan menjadi bahan evaluasi bagi tim PPM serta tindak lanjut program PPM kedepannya. Selain angket, evaluasi juga dilakukan melalui observasi pada pengelolaan perpustakaan desa serta wawancara singkat dengan aparatur desa dan pengelola perpustakaan desa. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman, keterampilan serta keberhasilan pengelolaan perpustakaan desa.

4. Tahap Pendampingan dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pelatihan selesai dilaksanakan, peserta pelatihan selanjutnya akan diberi waktu selama dua minggu dihitung dari selesainya kegiatan pelatihan. Dalam kurun waktu pelatihan ini, peserta pelatihan akan diminta untuk mempraktikkan ilmu yang diperoleh melalui pelatihan di perpustakaan sekolah masing-masing. Selama dua minggu itu pula peserta pelatihan akan didampingi secara jarak jauh oleh tim pengabdian. Setelah dua minggu tahap pendampingan, tim pengabdian akan melakukan visitasi untuk mengecek perpustakaan desa dan peserta pelatihan guna melihat capaian pengelolaan perpustakaan desa setelah personel pengelola mengikuti pelatihan. Dengan demikian, informasi mengenai capaian pengelolaan perpustakaan desa pasca pelatihan secara otomatis menjadi umpan balik/*feedback* bagi tim PPM terkait dengan keberhasilan kegiatan pelatihan. Di samping itu, visitasi yang dilakukan oleh tim pengabdian ini juga bertujuan untuk membantu peserta pelatihan memecahkan masalahnya secara langsung. Hasil visitasi ini selanjutnya akan menjadi dasar atau masukan bagi tim pengabdian dalam menentukan tindak lanjut kegiatan PPM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dilaksanakan secara campuran/*blended* yakni pelatihan yang dilakukan secara tatap muka di Kelurahan Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo. Kegiatan PKM diawali dengan pendampingan pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan desa. Kegiatan berupa diskusi secara daring dengan aparatur desa serta pengelola perpustakaan desa tentang pengelolaan perpustakaan desa yang sudah berjalan. Pendampingan dilakukan sepanjang bulan Agustus sampai September 2022. Kegiatan pendampingan juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi perpustakaan desa di Giripurwo yang akan ditindaklanjuti oleh tim pada program selanjutnya.

Kegiatan pendampingan perpustakaan desa juga bertujuan untuk membantu dan mendukung desa untuk mengikuti lomba perpustakaan desa berprestasi tingkat provinsi. Tim pengabdian memberikan bantuan dan jasa konsultasi pada perpustakaan desa untuk mengoptimalkan perpustakaan desa pada keikutsertaannya di program lomba perpustakaan desa. Selain itu, tim pengabdian juga melakukan sosialisasi tentang pengelolaan perpustakaan desa sesuai dengan standar. Diharapkan pengelolaan perpustakaan desa berjalan merujuk pada standar nasional yang sudah ditentukan oleh Perpustakaan Nasional.

Selanjutnya, kegiatan inti dari PKM yakni sosialisasi dan pelatihan. Materi sosialisasi didasarkan pada kebutuhan pengelolaan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. Dengan demikian, perpustakaan desa dapat mendukung program nasional dan partisipasi masyarakat pada perpustakaan desa menjadi meningkat.



Gambar 2. Pelaksanaan PPM

Pelaksanaan diikuti oleh 51 orang masyarakat yang terdiri atas aparatur desa dan perwakilan masyarakat. Metode kegiatan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi, praktik, proyek mandiri dan simulasi terkait materi yang diberikan. Peserta mengikuti pelatihan dengan serius dan sesuai dengan susunan acara. Kegiatan dipandu oleh MC dan moderator. Kegiatan dimulai pukul 08.00 – 12.00 WIB dengan 3 pengabdian dan 1 narasumber tamu yang akan menyampaikan materi pelatihan.

Secara spesifik kegiatan sebagai berikut.

- a. Materi pertama dibuka oleh pemaparan yang disampaikan oleh Rahmat Fadhli, S.IIP., M.A. Materi yang disampaikan yakni tentang peran masyarakat dalam pengembangan dan penyelenggaraan perpustakaan desa. Tujuan pemberian materi ini yakni memberikan pengetahuan dan motivasi kepada para peserta tentang posisi strategis perpustakaan desa khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di desa.



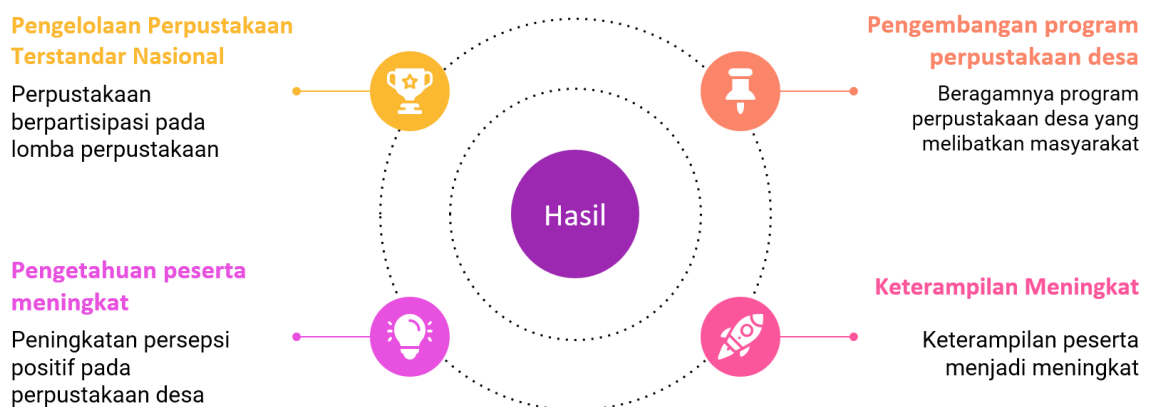
Gambar 3. Materi sesi 1 tentang peran masyarakat dalam pengembangan perpustakaan desa

Pada sesi ini, peserta juga diberikan kesempatan untuk menuangkan pendapatnya terhadap persepsi mereka terhadap perpustakaan desa, dan kontribusi yang dapat dilakukan pada pengembangan perpustakaan desa. Lebih lanjut, pengembangan perpustakaan desa juga ditekankan pada optimalisasi program perpustakaan desa yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Harapannya, penyelenggaraan perpustakaan desa tidak hanya sebagai sumber informasi namun dapat menjadi pusat kegiatan dan peningkatan keterampilan masyarakat sesuai dengan konsep inklusi sosial.

- b. Aktivitas kedua disampaikan oleh Dr. Setya Raharja, M.Pd. yang berfokus pada *capacity building* perangkat desa. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang perangkat desa Giripurwo. Pelatihan ini sebagai fasilitasi peningkatan kapasitas perangkat desa dari beberapa aspek keterampilan. Khususnya kolaborasi, penyelesaian masalah (*problem solving*) serta pengambilan keputusan (*decision making*) secara cepat dan tepat didasarkan dari proses identifikasi masalah (*key problem*). Kegiatan kedua ini dilakukan secara berkelompok dan dipimpin langsung oleh tim pengabdian.
- c. Kegiatan ketiga disampaikan oleh Intan Nur Latifah, Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Materi yang disampaikan seputar penguatan dan pelatihan *public speaking* kepada kelompok masyarakat seperti Ibu-Ibu penggerak PKK, Karang Taruna, serta pihak lainnya. Kegiatan dilakukan dengan metode teori dengan diskusi serta praktik. Pada bagian akhir program, peserta diharapkan dapat memiliki keterampilan *public speaking* yang dekat dengan perannya di lingkungan masyarakat. Keterampilan *public speaking* yang diberikan yakni berupa *master of ceremony* serta keterampilan memberikan sambutan dalam forum.

Pemilihan materi pelatihan disesuaikan dengan karakteristik peserta pengabdian. Materi ini juga sejalan dengan pengabdian yang dilakukan oleh Prasyesti (2021) dan Purwantini et al. (2021) yang melakukan pengabdian kemampuan manajemen perpustakaan berbasis inklusi sosial. Materi yang disampaikan pada konteks kegiatan tersebut yakni pengoptimalan peran dan fungsi perpustakaan dalam peningkatan literasi untuk kesejahteraan, perencanaan kegiatan partisipatif yang melibatkan masyarakat serta evaluasi kinerja perpustakaan desa. Kebaruan pada pengabdian ini yakni tidak hanya berfokus menasar pengelola perpustakaan desa saja, melainkan melibatkan berbagai unsur masyarakat termasuk aparatur desa. Tujuannya agar kelompok-kelompok yang ada pada desa menyadari pentingnya dan fungsi strategis perpustakaan desa untuk menunjang kegiatan ataupun program yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum hasil PPM ini digambarkan pada bagan berikut.



Gambar 4. Hasil PPM

Gambar di atas menunjukkan bahwa pendampingan bagi perpustakaan desa termasuk masyarakat desa terkait peran dan posisi strategis perpustakaan desa dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat secara umum. Selain itu, pendampingan perpustakaan desa juga perlu melibatkan aparatur desa agar aparatur mengetahui dan menyadari potensi yang dimiliki perpustakaan desa, termasuk program yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat. Hasil pengabdian ini juga sejalan dengan hasil pengabdian Atmi et al., (2022) yang mengindikasikan bahwa program dapat menambah pengetahuan manajemen perpustakaan desa serta meningkatkan keterampilan teknis bagi masyarakat. Sehingga, pada akhirnya dapat mendukung perpustakaan desa berbasis inklusi sosial.

Pada poin pertama hasil PPM, perpustakaan desa dapat memenuhi Standar Nasional Perpustakaan Desa/Kelurahan yang tertuang dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017. Perpustakaan desa selanjutnya juga mengikuti lomba perpustakaan desa berprestasi di Daerah Istimewa

Yogyakarta pada tahun 2022. Selanjutnya, hasil PPM juga mendorong adanya program perpustakaan desa. Perpustakaan desa dapat melayani beberapa layanan pada masyarakat seperti layanan referensi dan layanan sirkulasi, program penguatan literasi dan promosi membaca pada masyarakat serta program inklusi sosial berupa pelatihan public speaking pada aparaturnya masyarakat.

Hasil PPM yang lain yakni pengetahuan peserta meningkat khususnya masyarakat non-pengelola perpustakaan. Tim PPM pada awalnya mengidentifikasi pengetahuan dan pemahaman tentang peran perpustakaan desa bagi masyarakat. Hasil identifikasi ditemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap perpustakaan desa hanyalah sebagai simbol desa, bahkan sebagai tempat buku-buku yang tidak menarik. Melalui pelatihan ini, persepsi tersebut secara perlahan berubah positif bagi masyarakat. Masyarakat kelompok sasaran PPM mengetahui peran besar perpustakaan desa sebagai lembaga integral dalam pembangunan serta pengembangan SDM desa. Sedangkan aspek keterampilan meningkat dilihat dari keterampilan pengelola perpustakaan desa yang sudah dapat mengelola perpustakaan desa dengan kaidah pengelolaan perpustakaan.

Pada pelaksanaan PPM ini terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya:

- a. Kerja sama dengan Kelurahan Giripurwo Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo sehingga semakin memantapkan penyelenggaraan kegiatan dan motivasi peserta,
- b. Kebutuhan masyarakat yang perlunya pengetahuan terkait tentang optimalisasi perpustakaan desa,
- c. Antusiasme peserta dalam kegiatan pelatihan sehingga memudahkan proses internalisasi pengetahuan dan praktik yang disampaikan dalam kegiatan pelatihan,
- d. Kegiatan yang tidak hanya berfokus pada teori, namun disajikan dalam berbagai variasi seperti diskusi, praktik, tuang gagasan, project dan lainnya,
- e. Kekompakan tim pengabdian baik antara tim dari Fakultas Ilmu Pendidikan UNY maupun dengan panitia lokal yang ada di Kelurahan.

Sedangkan faktor penghambatnya yakni:

- a. Keterbatasan lokasi PPM sehingga tidak dapat menampung banyak peserta dari berbagai kalangan di desa.
- b. Perpustakaan desa yang sedang dalam proses renovasi sehingga tim tidak dapat memberikan pendampingan langsung terkait pengelolaan teknis perpustakaan,
- c. Kesesuaian waktu penyelenggaraan antara peserta dan tim pengabdian.

Merujuk pada Surat Keputusan SK Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001, perpustakaan desa atau kelurahan diartikan sebagai perpustakaan masyarakat yang menjadi salah satu sarana atau media untuk meningkatkan dan mendukung kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan serta menjadi bagian integral dari kegiatan pembangunan desa/ kelurahan. Pada prinsipnya, Perpustakaan Desa merupakan salah satu jenis perpustakaan umum yang berada di desa, dikembangkan oleh masyarakat desa, serta memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat desa (Putra & Khoiriyah, 2020).

Perpustakaan desa atau kelurahan dalam Standar Nasional Perpustakaan merupakan perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau kelurahan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa atau kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi, dan gender.

Pada hakikatnya Perpustakaan Desa berfungsi untuk membuat seluruh orang desa untuk menyadari pentingnya perpustakaan untuk menunjang segala aktivitas kehidupan mereka. Perpustakaan Desa berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Wulansari et al. (2021) menjelaskan bahwa perpustakaan desa dapat bertransformasi sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, pusat solusi untuk mengatasi permasalahan kehidupan di masyarakat serta sebagai pengembangan minat dan bakat masyarakat.

Inklusi sosial dalam perpustakaan pada komunitas masyarakat merupakan aspek penting dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal ini bertujuan agar setiap proses pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat terhadap informasi-informasi yang tengah berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Inklusi sosial di perpustakaan sebagai lembaga informasi juga berfungsi sebagai ruang layanan publik yang bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya, baik melalui pameran-pameran, bedah buku, kumpul komunitas yang tersebar di wilayah layanan perpustakaan.

Untuk menciptakan suatu inklusi sosial dalam perpustakaan, tentu perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan risiko dari keadaan sosial yang dirugikan atau marginalitas, disabilitas dan usia, serta ras, baik suku asli maupun pendatang. Tidak ada layanan publik yang dapat memosisikan dirinya lebih baik dari perpustakaan umum yang selalu dapat mengolah dan mengusahakan lingkungan sosial yang inklusif bagi pemustakanya. Konteks inklusi sosial dalam perpustakaan adalah memahami bentuk-bentuk eksklusi sosial yang secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi individu dan kelompok dalam masyarakat. Eksklusi sosial juga dikaitkan dengan dimensi geografis, yang mencakup daerah perkotaan, pedesaan dan pinggiran kota. Perpustakaan sebagai lembaga publik dapat mengatasi eksklusi sosial pada tingkat individu dan kelompok dalam pembagian wilayah hidup masyarakat tersebut. Mereka dapat mengakses perpustakaan secara bebas tanpa kesulitan, perpustakaan dapat menciptakan sesuatu yang berharga bagi masyarakat yang terisolasi secara sosial.

Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial senantiasa memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat dengan melihat potensinya tanpa pandang bulu sehingga dapat mendorong masyarakat untuk berkembang dan saling berbaur satu sama lain. Hal ini melihat dari tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya yaitu, (1) adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat di perpustakaan, (2) perhatian terhadap hak seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan di perpustakaan, dan (3) aksesibilitas terhadap informasi di perpustakaan bagi semua lapisan masyarakat (Kurniasih & Saefullah, 2021; Mahdi, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perpustakaan desa memiliki peran strategis dan menjadi bagian integral dalam pengembangan masyarakat desa. Tidak hanya melalui koleksi yang dimiliki perpustakaan desa, namun perpustakaan desa dapat mengoptimalkan koleksi-koleksi yang dimiliki untuk pemberdayaan masyarakat bahkan melalui program-program pemberdayaan. Adapun kesimpulan dari PPM ini sebagai berikut.

- a. Tim pengabdian dari Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta sudah melakukan kegiatan optimalisasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial pada Giripurwo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Materi pelatihan difokuskan pada kebijakan pengembangan perpustakaan desa serta peran serta masyarakat dalam program perpustakaan desa. Serta beberapa materi pendukung berupa capacity building dan pelatihan public speaking bagi aparatur desa.
- b. Meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta pelatihan pada pengelolaan dasar perpustakaan desa serta ide dan konsep pengembangan perpustakaan desa ke arah perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- c. Diperlukannya pelatihan lanjutan berkaitan dengan aspek inklusi sosial pada perpustakaan desa dengan kegiatan lain yang meningkatkan keterampilan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait peran strategis dan integral perpustakaan desa.

Saran

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di masa yang akan datang, maka beberapa masukan berikut dapat dijadikan sebagai acuan

- a. Perlunya peran serta masyarakat yang optimal dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan desa sehingga dapat mengoptimalkan fungsi perpustakaan desa yang menjadi

- bagian integral dalam pengembangan desa.
- b. Di samping melibatkan unsur formal kelembagaan, pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian juga sangat diperlukan. Selain bermanfaat secara akademik dalam menguatkan pengetahuan lapangan, pelibatan mahasiswa juga bermanfaat secara administratif bagi lembaga (jurusan) untuk menunjukkan adanya pemberdayaan mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - c. Agar kegiatan pelatihan menjadi bermakna, maka diperlukan analisis kebutuhan lapangan. Oleh karena itu, analisis situasi sebelum penyelenggaraan pelatihan sangat perlu dilakukan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan PKM ini dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Negeri Yogyakarta dengan skim Pengabdian Kepada Masyarakat PkM Pengembangan Wilayah (SDGs) Nomor T/3.44/UN34.21/PM.01.01/2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. (2015). Membangun Perpustakaan Desa Menjadi Peletak Dasar Lahirnya Budaya Baca Masyarakat Di Pedesaan. *Jupiter*, 14(2), 78–82. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/jupiter/article/viewFile/40/38>
- Asnawi, A. (2015). Perpustakaan Desa sebagai Sumber Layanan Informasi Utama. *Media Pustakawan*, 22(3), 41–42.
- Atmi, R. T., Gunarti, E., Mutia, F., & Prihatini, I. C. (2022). Peningkatan literasi masyarakat melalui perpustakaan desa berbasis inklusi sosial. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 486–497. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/jipemas.v5i3.15559>
- Dinas Arsip Perpustakaan Gorontalo. (2018). *Minim koordinasi dan promosi, perpustakaan desa sepi pembaca*. Humas Pemprov Gorontalo. <https://gorontaloprov.go.id/minim-koordinasi-dan-promosi-perpustakaan-desa-sepi-pembaca/>
- Fitrianto, A. (2014). *Pemasaran dan promosi perpustakaan desa*. DPAD Yogyakarta. <http://dpad.jogjaprov.go.id/article/library/vieww/pemasaran-dan-promosi-perpustakaan-desa-579>
- Haryono, T. R. (2018). *Menuju sukses tata kelola perpustakaan desa*. Azyan.
- Kecamatan Gerokgak. (2021). *Tantangan dan hambatan perpustakaan desa*. Pemerintah Kabupaten Buleleng Kecamatan Gerokgak. <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/16-tantangan-dan-hambatan-perpustakaan-desa>
- Kurniasih, R. I., & Saefullah, R. S. (2021). Inklusi Sosial Sebagai Transformasi Layanan di Perpustakaan Daerah Karanganyar. *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan*, 7(2), 149–160. <https://doi.org/10.14710/lenpust.v7i2.34599>
- Mahdi, R. (2020). Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial: Apa dan Bagaimana Penerapannya? (Sebuah Kajian Literatur). *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 15(2), 201. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.152.201-215>
- Mukharomah, Holifatul Cikusin, Y., & Suyeno, S. (2019). Peran Perpustakaan Desa Dalam Menumbuhkan Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Respon Publik*, 13(3), 85–89.
- Prasyesti, M. (2021). Peningkatan Kemampuan Manajemen Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Pengelola Perpustakaan Desa di Ponorogo. *BIDIK: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1–6. <https://doi.org/10.31849/bidik.v1i2.5702>
- Purwantini, A. H., Aziza, D. A., Kurniawan, A. B., Azizah, F. N., Utami, W. I., & Anggitasari, F. (2021). Optimalisasi Peran Perpustakaan Desa Donorojo Berbasis Inklusi Sosial Guna Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Community Empowerment*, 6(3), 480–485. <https://doi.org/10.31603/ce.4348>
- Putra, P., & Khoiriyah, S. (2020). *Manajemen perpustakaan desa*. Petualang Literasi.
- Wulandari, E., & Rahma, E. (2017). Tata Ruang di Perpustakaan Politeknik Negeri Padang. *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kearsipan*, 6(1), 109–115. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/iipk/article/view/8148>

Wulansari, A., Sumaryanti, L., Syam, A. R., Laksana, S. D., & Asih, A. (2021). Dampak transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. *Publis Journal*, 5(2), 34–47. <https://doi.org/10.24269/pls.v5i2.4805>